V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dengan tahap aplikasi yaitu dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan sediaan farmasi yaitu : Pasal 386 Ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan obat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Tahap eksekusi dilakukan dengan menegakan peraturan yang telah dibuat melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Setelah Hakim selaku aparat penegak hukum menjatuhkan putusan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan sediaan farmasi selanjutnya dilakukan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana dengan pidana penjara maupun pidana denda.

Upaya penegakan hukum juga dilakukan secara *preventif* yaitu dengan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dibentuknya Undang-undang yang

mengatur tentang kefarmasian dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik serta melalui penyuluhan secara langsung pada masyarakat adalah salah satu bentuk upaya *preventif* pemerintah dan dinas terkait untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran terkait tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum secara *preventif*.

Penegakan hukum secara *Represif* yaitu pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana yaitu penerapan sanksi yang merupakan ancaman bagi para pelakunya. Upaya tersebut dilakukan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian berdasarkan temuan Badan POM terhadap pelaku yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Tuntutan jaksa yang dijukan dalam proses persidangan dan putusan hakim dalam persidangan yang diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku juga merupakan salah satu upaya represif yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi.

2. Faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi mencakup Faktor Hukum yaitu belum adanya peraturan daerah yang menjadi landasan atau pedoman dalam menjalankan aturan mengenai tentang tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan

dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi di kabupaten atau kota di Provinsi Lampung.

Faktor Penegak Hukum, mereka yang secara langsung berkecimpung dalam upaya menjalankan peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi. Beberapa aparat penegak hukum belum menjalankan tugasnya secara maksimal, aparat penegak hukum hanya bersifat pasif yaitu menunggu laporan dari masyarakat tentang peredaran farmasi yang tidak memiliki izin edar atau setelah masyarakat dirugikan secara langsung.

Faktor sarana yaitu, jumlah petugas Badan POM Provinsi Lampung yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja Lampung yang luas, anggaran dana Badan POM Provinsi Lampung yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja.

Faktor lain adalah faktor masyarakat yang merupakan sesuatu yang penting dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi, karena masyarakat merupakan konsumen sedangkan sediaan farmasi sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Rendahnya pengetahuan serta kepedulian masyarakat menyebabkan semakin meningkatnya angka peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Tingginya permintaan masyarakat akan obat serta kosmetik yang dapat memberi efek cepat dan keuntungan besar yang didapat oleh penjual juga menjadi salah

satu faktor penghambat dalam proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmaasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan maka saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Pihak berwenang diharapkan dapat bersikap proaktif dalam menyikapi maraknya peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar serta meningkatkan pemahaman serta kinerja dalam mencegah peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung harus lebih ditingkatkan untuk menghindari penyebaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar agar tidak semakin meluas.

Hakim yang menangani perkara tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi diharapkan dapat bersikap seadil-adilnya dalam memberikan putusan terhadap terdakwa sehingga menimbulkan efek jera.

Perlu adanya penambahan jaringan atau institusi Badan POM-RI di tingkat kabupaten atau kota yang sekiranya strategis dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengawasan, pemantauan dan sosialisasi kebijakan di bidang obat dan makanan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana maupun pelanggaran di bidang obat dan makanan. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi Badan POM Provinsi Lampung dalam rangka menciptakan integritas dan kualitas kerja yang lebih optimal.

Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan mengupayakan agar disetiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung membuat peraturan daerah terkait

peredaran sediaan farmasi dan izin praktek farmasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung diharapkan untuk lebih efektif dalam melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, lebih rutin melakukan sidak atau razia ke pasar-pasar yang menjual sediaan farmasi dan bertindak tegas terhadap oknum yang tertangkap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dengan melakukan upaya hukum untuk menindaklanjuti.

Masyarakat juga diminta untuk menjadi konsumen yang pintar, konsumen yang pintar adalah konsumen yang dapat memahami dengan baik bahaya sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar serta tidak tertarik dengan harga murah serta khasiat instan yang ditawarkan suatu produk sehingga dapat terjamin keselamatannya. Selain itu perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum yang ada di instansi seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen maupun Lembaga Non Departemen lainnya

Dengan demikian kepastian hukum dapat tercipta bagi masyarakat serta dapat terwujudnya masyarakat sehat yang sejahtera.